

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi. *Kemahiran Dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*. Malang: Bayumedia publishing, 2013.

Adji, Oemar Seno. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga, 1987.

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Atmasasmita, Romli. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2000.

Beever, Allan. "Aristotle On Equity, Law, And Justice*," 10:33–50. United States of America: Cambridge University Press, 2004.

Dirdjosisworo, Soedjono. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: Alumni, 1987.

Dirjosisworo, Soedjono. *Hukum Narkotika Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.

Lamintang. *Hukum Penintesiser Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

———. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Edisi Kedu. Yogyakarta: Liberty, 2009.

———. "Sistem Peradilan Di Indonesia." 4 *Jurnal Hukum FH-UII Jakarta*, 1997.

Mertokusumo, Sudikno, and A Pitlo. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. Bandung:

Citra Aditya Bakti, 1993.

Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. NTB: Mataram University Press, 2020.

Muladi. “Prinsip-Prinsip Pengadilan Pidana Bagi Pelanggar HAM Berat Di Era Demokrasi.” In Makalah Seminar, 16, n.d.

Muladi, and Barda Nawawi. Teori Dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 1992.

Nugroho, Sigit Supto, Tri Anik Haryani, and Farkhani. Metodologi Riset Hukum. Perumahan Palur Wetan: Oase Pustakan, 2020.

Sudarto. Hukum Pidana I. Cetakan ke. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, 1990.

Supramono. Hukum Narkotika Indonesia. Jakarta: Djambatan, 2001.

Suseno, Franz Magnis. Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral. Jakarta: Pustaka Filsafat, 1987.

B. Hasil Penelitian

Adi, Yoga Pratama, and Dessi Perdani Yuris Puspita Sari. “Penjatuhan Pidana Penjara dibawah Ancaman Minimum Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 220/Pid.Sus/2017/PN Pwt) Yoga.” S.L.R 2 (2021): 167–86.

Aneta, Fitria, Riki Zulfiko, and Mahlil Adriaman. “Tinjauan Yuridis dan Kepastian Hukum Antara Pasal 112 dan Pasal 127 Uu Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” 3, no. 01 (2024): 30–42.

- Annisa, Sofia, and Ismawati Septiningsih. "Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika." *Verstek* 12, no. 4 (2019): 291–300.
- <https://edoc.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/13892/GABUNGAN.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Astini, Dewi. "Pengaturan Tindak Pidana Narkotika dalam Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Warta Edisi*, 2017.
- Fadhil, Muhammad. "Analisis Penerapan Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika kepada Penyalahguna Narkotika (Studi Kasus: 128/Pid.Sus/2023/PN Kln)." *Jurnal Ilmu Syariah & Ilmu Hukum*, no. 1 (2023): 1–18.
- <https://doi.org/10.21111/jicl.v7i1.11187>.
- Faiz, Pan Mohamad. "Teori Keadilan Jhon Rawls," 2017.
- <https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573>.
- Gukguk, Roni Gunawan Raja, and Nyoman Serikat Putra Jaya. "Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime." *Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019).
- Hananta, Dwi. "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana." *Hukum Dan Peradilan* 7, no. 1 (2018): 87–108.
- Haris, Oheo K. "Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di Bawah Minimum Khusus pada Perkara Pidana Khusus." *Ius Constituendum* 2, no. 2 (2017).
- Hariyawan, Agus Sukma, and Sagung Putri M E Purwani. "Analisis Yuridis Pasal 112 Dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :

- Upaya Reformulasi Untuk Menjamin Kepastian Hukum.” *Journal of Contemporary Laws Studies* Volume: 2, no. 2 (2025): 141–52.
- Herman, Handrawan, Oheo Kaimuddin Haris, Idaman Alwi, Sitti Aisah Abdullah, La Ode Muhamad Sulihin, and Taufiq. “Implikasi Penyimpangan Penerapan Putusan Hakim Di Bawah Minimum Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika.” *Halu Oleo Legal Research* 7, no. 1 (2025): 50–65.
- Huestis, Michael A. “Human Cannabinoid Pharmacokinetics.” *Chemical Biodiversity* 4, no. 8 (2007): 1770–1804.
- Iksan, Muchamad. “Asas Legalitas dalam Hukum Pidana : Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Jinayah).” *Jurnal Serambi Hukum* 11, no. 01 (2017): 1–26.
- Iswahyuni, Ari. “Kedudukan Ancaman Pidana Minimal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasca Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015.” *Jurnal Panorama Hukum* 3, no. 1 (2018): 19–32.
- Khalid, Afif. “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia.” *Al’ Adl* 6, no. 11 (2014).
- Muyono, Helen. “Asas Kepastian Hukum dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.” *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 12, no. 35 (2023): 281–93.
<https://doi.org/10.20956/verstek.v7i2.xxxx>.

Pardede, Rendra Yoki, Alvi Syahrin, Mohammad Ekaputra, and Mahmud Mulyadi.

“Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Di Bawah Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 775K/Pid.Sus/2020).” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 2, no. June (2022): 53–67.
<https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jkih/article/view/22>.

Putra, Hendra Catur. “Kedudukan SEMA Dalam Sistem Hierarki Perundang-Undangan Di Indonesia,” 2023, 130–43.

Qomariyyah, Naili. “Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana di Bawah Batas Minimum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Smn),” 2021.

Rahmawan, Junaedi, and Waluyadi. “Penjatuhan Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika Pada Pengadilan Negeri Kuningan.” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 11 (2022).

Rambe, Naharuddin, Alvi Syahrin, Sunarmi, and Mahmud Mulyadi. “Penerapan Pasal 112 Dan Pasan 127 Ayat 1 Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1023/Pid.Sus/2018/PN. Rap; 762/Pid.Sus/2017/PN. Rap; 712/Pid.Sus/2017/PN.Rap).” *Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 2, no. December (2022).

- Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A M Djaelani Prasetya, and Ali Rizky. “Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan.” *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 176–88.
- Rumadan, Ismail. “Penafsiran Hakim Terhadap Ketentuan Pidana Minimum Khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana.” *Hukum Dan Peradilan* 2, no. 3 (2013).
- Ruman, Yustinus Suhardi. “Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan.” *Humaniora* 3, no. 45 (2012): 345–53.
- Saragih Yasmira, Hadiyanto alwan. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Unpam Press, 2022. <https://books.google.co.id/books?id=fGLBEAAAQBAJ>.
- Setyawan, Edo Hendra, Winarno Budyatmojo, and Budi Setiyanto. “Implementasi Pemidanaan di Bawah Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Narkotika.” *Recidive* 8, no. 3 (2019): 227–37.
- Siagian, Sulis Angrayni. “Akibat Hukum Terhadap Putusan Hakim yang Menyimpang dari Sanksi Pidana Minimum dalam Perkara Narkotika (Studi Putusan Nomor 125 / Pid.Sus/2024/PN/Bir) Sulis.” *Karimah Tauhid* 4 (2025): 6145–58.
- Soedirjo dalam Freddy Simanjuntak, Dkk. “Penerapan Surat Dakwaan Oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.” *Doktrina: Journal of Law* 3, no. 2 (2020).
- Sulaiman, Abdullah. “Penghantar Ilmu Hukum.” UIN Jakarta Bersama Yayasan Pendidikan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2019, 35–37.

Thomas, Jerry. “Analisis Putusan Mahkamah Agung Mengenai Putusan Yang Dijatuhkan Di Luar Pasal Yang Didakwakan Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika,” 2014.

Vidiasari, Devianti. “Kekaburan Makna Kata Menguasai Dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” 2024.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Jmr.

D. Website

- Chandra, Yonatan Iskandar. “KUHP Baru, Masalah Lama: Pasal (Keranjang Sampah) Narkotika Kembali Menghantui.” Dandapala Contributor, 2025.
<https://dandapala.com/article/detail/kuhp-baru-masalah-lama-pasal-keranjang-sampah-narkotika-kembali-menghantui>.
- Priyantoro, Deni Eka. “Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli,” n.d.
<https://prasko17.blogspot.com/2011/05/pengertian-tindak-pidana-menurut-para.html>.
- Rizki, M. Januar. “Ini Pasal ‘Ambigu’ Dalam UU Narkotika.” Hukum Online, 2018.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-pasal-ambigu-dalam-uu-narkotika-lt5b4dd755128bc/?page=all>.